

EFEKTIFITAS SISTEM AKUNTANSI DALAM LAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi Kasus Pada Kelurahan Desa Karangdowo)

Khorisatul Amanah¹, Rohmad Abidin²

^{1,2} UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: khorisatulamanah@gmail.com¹, rohmad.abidin@uingusdur.ac.id²

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan yang dialami desa terkait pengelolaan dana desa dan memahami bersama lebih dalam tentang pengelolaan Dana Desa dengan menggunakan sistem yang berkomputerisasi, pelaporan dana desa akan mampu dilakukan dengan cepat dan output laporan keuangannya juga akan lebih handal di banding dengan pelaporan secara manual. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dalam pendekatan deskriptif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan pengumpulan data serta dokumentasi yang digunakan untuk hasil penelitian. Dan sampel pada penelitian ini adalah mencari dan mengumpulkan data dengan proses wawancara yaitu mewawancarai sekretaris dan bendahara di kelurahan di desa karangdowo. untuk menyediakan informasi bagi perusahaan sehingga dapat memperbaiki system yang sudah ada sesuai dengan system pengendalian intern yang baik. Dalam penelitian ini menemukan masalah utama yang perlu di analisis dalam pengelolaan dana desa yaitu masih belum memadainya sumber tenaga jaringan dan PLN yang menyebabkan berbagai macam hambatan dalam proses penelolaaan keuangan desa dan juga sumber daya manusia yang masih terbilang kurang dan tertinggal dari pada kota atau kabupaten. Akuntansi Desa merupakan pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa. Dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan serta pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan suatu informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan beberapa pihak yang berhubungan dengan desa.

Kata kunci: sistem akuntansi, pengelolaan, sistem keuangan desa, dana desa

ABSTRACT : This study aims to identify problems experienced by villages related to managing village funds and to understand more deeply about managing village funds using a computerized system, village fund reporting will be able to be done quickly and the output of financial reports will also be more reliable than manual reporting. The research method used is qualitative in a descriptive approach using observation techniques, interviews and data collection and documentation used for research results. And the sampel in this study was to find and collect data with an interview process, namely interviewing the secretary and treasurer in the village of karangdkowo village. In addition to providing information for the company so that it can improve the existing system in accordance with a good internal control system. In this study found the main problem that needs to be analyzed in the management of village funds, namely that there are still inadequate sources of network power and PLN which cause various kinds of obstacles in the process of managing village finances and also human resources which are still lacking and lagging behind cities or regencies. Village Accounting is a record of transaction processes that occur in the village. Evidenced by notes, then recording and financial reporting is carried out so that it will produce information in the form of financial reports that are used by several parties related to the village.

Keywords: accounting system, management, financial system, village funds

1. PENDAHULUAN

Di dalam pengelolaan dana desa perlu adanya peraturan-peraturan oleh karena itu dengan ditetapkannya undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang meliputi penanggulangan kemiskinan, pembangunan sarana dan prasarana desa, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan agar bisa tetap berjalan yang mana tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk mensejahterakan masyarakat, tentunya menjadi kebijakan dan hal yang bagi masyarakat karena masyarakat akan mendapatkan bantuan dana dari pemerintah sesuai dengan undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 bahwa setiap desa akan memperoleh pendapatan dari pemerintah sebagai pembangunan desa sehingga tiap desa akan memperoleh sejumlah uang dari pemerintah. Namun bantuan dana tersebut difokuskan untuk untuk hal-hal yang bermanfaat dalam kaitannya untuk desa seperti untuk melakukan pembangunan-pembangunan yang lebih baik. Hal tersebut didukung dengan ditetapkannya kebijakan baru pendanaan desa dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).(Permen 2014)

Dan dana sendiri yaitu dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa untuk desa adat yang ditransfer melalui APBN kabupaten/kota. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat("PP N0.60" 2014) . Di wilayah desa karangdowo sendiri menerima dana dan dana pengelolaan dana desa tersebut diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa disepakati bersama yang sebelumnya dilakukan musyawarah desa dan membuahkan hasil yaitu bahwa pengelolaan dana desa digunakan untuk meningkatkan proses perencanaan desa, mendukung kegiatan ekonomi BUMD/masyarakat, menciptakan kader pemberdayaan, pengorganisasian bantuan hukum bagi masyarakat, penyelenggaraan Kesehatan, dan peningkatan kapasitas melalui kelompok-kelompok masyarakat.

Menurut pasal 24 huruf g UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menerangkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa beraskan akuntabilitas adalah asas yang memastikan bahwa tiap aktivitas serta hasil akhir dari aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa wajib bisa dipertanggungjawabkan kepada warga desa. (Permendagri 2014) Peraturan diterbitkan agar dapat membuat pemerintahan desa melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan yang ditetapkan.

Didalam pengelolaan dana desa perlu adanya pencatatan sistem akuntansi yang efektif. Sistem akuntansi adalah suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen sebagai alat pengawasan demi kelancaran aktivitas perusahaan dimasa yang akan datang (Priantara 2020). Jika tidak berjalan secara efektif maka bisa timbul kesalahan-kesalahan yang bisa menghambat dalam pelaporan dan pencatatan sehingga perlu pengecekan ulang untuk mengidentifikasi letak masalahnya.

Sedangkan pendapat para ahli akuntansi lainnya marom (2002:1) mengemukakan bahwa sistem akuntansi adalah: "Merupakan gabungan dari formulir-formulir, catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola dalam suatu badan usaha, dengan tujuan menghasilkan informasi-informasi keuangan yang di perlukan manajemen dalam mengawasi usahanya atau untuk pihak-pihak lain yang berkepentingan (ismail, M., Widagdo, A.K., & Widodo 2016). Sehingga tidak heran jika dalam pelaporan keuangan kerap disertakan dengan banyak berkas, formulir, catatan, dan lain-lain untuk mendukung sebagai bukti informasi dalam pelaporan. Selain itu juga bermanfaat sebagai alat pembantu jika terdapat pelaporan yang salah dan mempermudah dalam mengidentifikasi kesalahan.

Di dalam pelaporan Pemerintah harus menjalankan Sistem Akuntansi bukan hanya sebagai sistem pengendali proses transaksi keuangan melainkan harus menjadi suatu pencapaian tujuan organisasi sebagaimana yang sudah ditetapkan dari tujuan suatu organisasi tersebut, dengan diterapkannya sistem akuntansi sangatlah berguna untuk mendukung pemerintahan baik daerah ataupun kota, sehingga pemerintahan desa mudah dalam melakukan pelaporan serta pertanggungjawaban kepada pemerintahan di kabupaten. hal itu berperan penting dalam hal terkait pemakaian uang dana desa yang digunakan untuk apa saja karena setelah pencairan dana ke masyarakat perlu adanya pertanggungjawaban untuk pencairan dana setelahnya. Untuk mengetahui sejauh mana progress dalam pengelolaan dana desa selain itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dari seluruh pihak perangkat desa dan juga masyarakat terkait penggunaan dana bantuan tersebut karena pada kenyataannya berdasarkan pembangunan dan pemberdayaan masih kurang dan dengan diterapkannya sistem akuntansi didalam pengelolaan dana desa bisa membantu dalam mengidentifikasi terkait dengan catatan pelaporan pengeluaran keuangannya.

Dengan demikian masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana desa ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemerdayaan dan pembangunan. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana desa sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana seharusnya. Hal ini, diakibatkan oleh ketidakmampuan para aparat desa yang belum memiliki kompetensi dalam pengelolaan dana desa (Sari, N., Ghozali, I & achmad 2017)

Pada pengelolaan dana desa masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana desa ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pemerdayaan dan pembangunan. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana desa sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana seharusnya. Hal ini, diakibatkan oleh ketidakmampuan para aparat desa yang belum memiliki kompetensi dalam pengelolaan dana desa. Didalam pengelolaan anggaran dana desa, ada akibat yang besar baik kesalahan administratif ataupun kesalahan substantif. pelaporan, dan tanggungjawab keuangan. Anggaran yang diperoleh dari bermacam sumber anggaran provinsi serta kabupaten (APBN dan APBD) memiliki banyak resiko, sehingga pengelolaan dana desa wajib transparan, akuntabel serta tidak disalahgunakan (telaumbanua, A., & Ziliwu 2022) (Mulyadi 2016)

Pemerintah harus menjalankan Sistem Akuntansi bukan hanya sebagai sistem pengendali proses transaksi keuangan melainkan harus menjadi suatu pencapaian tujuan organisasi sebagaimana yang sudah ditetapkan dari tujuan suatu organisasi tersebut, dengan diterapkannya sistem akuntansi sangatlah berguna untuk mendukung pemerintahan baik daerah ataupun kota, sehingga pemerintahan desa mudah dalam melakukan pelaporan serta pertanggungjawaban kepada pemerintahan di kabupaten (Permen 2014)

Sistem akuntansi keuangan regional adalah sistem yang mendokumentasikan, mengelola, dan memproses data manajemen keuangan regional dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada publik dan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam rangka merencanakan, mengimplementasikan, dan melaporkan Kembali pertanggungjawaban pemerintah daerah dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah yang baik yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang baik dan dapat dijadikan referensi Ketika akan mengambil suatu keputusan. Sistem informasi yang buruk dan tidak memberikan manfaat bagi pengguna laporan keuangan tidak akan

berguna dan pengguna akan mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan. (Bangsa 2018)

Proses mencapai laporan keuangan pemerintah yang berkualitas, salah satunya adalah melakukan pengawasan anggaran secara rutin dengan cara memberikan informasi kinerja keuangan, memberi manfaat alokasi keuangan dalam laporan anggaran dan tidak menghambat akuntabilitas pengawasan (Nicol & Downe 2016.). Penelitian Santiso (Santiso 2014) menemukan bahwa efektifitas legislatif pengawasan anggaran dapat menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah dan memperkuat akuntabilitas keuangan publik. Khaile(Khaile 2011) dan Schalk (Schalk 2014) menyatakan bahwa efektifitas pengawasan anggaran mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Nurillah (Nurillah 2014) dalam penelitian yang dilakukannya menemukan hasil yaitu terdapat hubungan yang positif antara sistem pengendalian internal pada kualitas laporan keuangan.

Berlandaskan perihal diatas pastinya muncul masalah yang menarik untuk dianalisa yang berhubungan dengan sistem akuntansi dalam laporan keuangan pengelolaan dana desa di desa karangdowo. Desa karangdowo adalah salah satu desa yang terdapat di kecamatan kedungwuni yang memperoleh dana desa dari pemerintah guna pembangunan desa tersebut dengan jumlah nominal yang belum diketahui. oleh karena itu dilaksanakan penelitian dengan mengamati sistem akuntansi desa dan laporan keuangan pengelolaan dana desa pada desa karangdowo. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami desa terkait pengelolaan dana desa dengan menggunakan sistem yang berkomputerisasi, pelaporan dana desa akan mampu dilakukan dengan cepat dan output laporan keuangannya juga akan lebih handal dalam pelaporan di banding dengan manual.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kualitatif dalam pendekatan deskriptif dengan menggunakan Teknik observasi, wawancara dan pengumpulan data serta dokumentasi yang digunakan untuk hasil penelitian. Dan sampel pada penelitian ini adalah mencari dan mengumpulkan data dengan proses wawancara yaitu mewawancarai sekretaris dan bendahara di kelurahan desa karangdowo. Selain mewawancarai, peneliti juga melakukan pengamatan secara langsung dan mempelajari dokumen-dokumen lain pada lokasi penelitian. Sumber data yang diperoleh adalah data primer (primary data). Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi. (Pangalila 2016). Teknik dari penelitian data yang digunakan adalah Teknik: 1). Wawancara (interview), 2). Dokumentasi, dan 3). Observasi (observation). (Sugiyono 2019)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Wawancara

Wawancara telah dilakukan dengan mewawancarai sekretaris dan bendahara di kelurahan desa karangdowo. Dari hasil wawancara dan observasi awal kepada bendahara kelurahan di desa karangdowo dan ditemukan beberapa hal yang mana peneliti menanyakan beberapa pertanyaan terkait apakah sistem keuangan desa telah diterapkan dengan baik dan benar dan pertanyaan lainnya.

Menurut bendahara desa karangdowo peneliti mendapatkan informasi bahwa sistem akuntansi sudah diterapkan dikelurahan sejak tahun 2015 yang lalu menggunakan aplikasi yang bernama SISKEUDES yaitu Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang bertujuan untuk mengawasi atau memonitoring pengelolaan dana desa sebelumnya aplikasi tersebut bernama SIMDA. Ada beberapa hambatan atau kendala dalam proses komputerisasi sistem pengelolaan dana desa yaitu gangguan dari tidak mendukungnya jaringan internet pada desa dikarenakan pada saat itu belum ada akses wifi dan pernah juga mengalami wifi mati di karenakan telat membayar tagihan wifi selama beberapa bulan dan menyebabkan akses wifi dimatikan sehingga para aparat mengalami kesusahan dalam pencatatan dan akhirnya harus melakukannya dengan cara manual yaitu dengan Microsoft excel. Dan hal ini membuat para aparat desa yang bekerja di bagian sistem keuangan desa komputeri merasa terhalangi dan harus lebih teliti dalam proses tersebut. Bendahara mengatakan bahwa menggunakan sistem akuntansi dalam laporan keuangan pengelolaan dana desa sangatlah membantu dalam tugas yang dikerjakannya, mempercepat proses penginputan sehingga meminimalisir kesalahan yang akan terjadi dalam pencatatan keuangan desa dan membuat bendahara cepat dalam memberikan hasil yang nantinya akan di pertanggungjawabkan oleh aparat desa. Namun dibalik itu terdapat beberapa hambatan dan kendala berupa terganggunya jaringan internet sehingga dalam proses penginputan pengelolaan dana desa mengalami keterlambatan dan diharuskan memakai metode manual dengan Ms. Excel untuk mendukung agar tidak terjadi kesalahan yang parah dalam penginputan.

Dalam wawancara kedua dilakukan dengan mewawancarai sekretaris desa tentang bagaimana pengawasan dan keterbukaan para pemerintahan desa terhadap keuangan desa pada desa karangdowo. Dan sekretaris desa karangdowo mengatakan bahwa ada beberapa kekurangan dalam pengawasan pembangunan desa dalam hal ini pemerintah sudah melaksanakan kebijakannya dengan baik yaitu dengan memberikan dana yang cukup bagi masyarakat. tetapi tidak mempertimbangkan dana tersebut apakah sudah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan prosedur atau belum. Walaupun sudah digunakan sesuai dengan yang di anjurkan tetapi pada kenyataannya masih terdapat kekurangan dalam laporan keuangan pengelolaan dana desa dan pada hal ini perlu perhatian lebih bagi pemerintah untuk memberikan perhatian lebih pada masyarakat sehingga pada zaman modern ini desa karangdowo tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Terkait tentang akuntabilitas desa karangdowo sudah melaksanakan keterbukaan atau transparansi dalam laporan keuangan pengelolaan dana desa kepada masyarakat dengan melaksanakan musyawarah desa dalam pelaporan keuangan desa karangdowo.

B. Sistem Akuntansi Terkomputerisasi

Sistem Keuangan Desa yang berbasis aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sistem keuangan desa ini adalah aplikasi sederhana yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagai alat atau sistem yang digunakan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, berupa Realisasi Anggaran dan APBDes Sistem akuntansi yang terkomputerisasi untuk melakukan pengelolaan dana desa sangat tepat mengingat juga dasar pendidikan kepala desa dan aparatnya bukan bidang akuntansi. Penyimpanan data pada pengelolaan keuangan desa tidak membutuhkan banyak dokumen tetapi data akan tersimpan dan bisa digunakan dalam waktu yang lama. Selain komputer merupakan alat pengolah data yang tepat dengan akses ketelitian maupun kecepatan tinggi, sistem komputerisasi juga akan menghemat waktu dan bekerja dengan tingkat akurasi yang lebih dibandingkan dengan sistem manual. Dengan begini Kepala Desa dan para Aparat desa dapat

melakukan pekerjaan dengan mudah dan teliti serta bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka dengan baik. Sistem prosedur penerimaan pendapatan pada Desa melalui transfer rekening desa. Melakukan transfer ke rekening kas desa kemudian perangkat desa membuat dokumen bukti Kas Masuk (BKM) mengisi tanggal dan nomor lain di bukti kas masuk, lalu di input bendaharadesa ke dalam aplikasi SisKeuDes. Hasil dari Sistem prosedur ini menjadi tanggungjawab para aparat desa kepada pemerintah dan masyarakat nantinya

Dari uraian diatas dan dukungan teori tentang system akuntansi, beserta hasil penelitian di lapangan yang di peroleh dari hasil wawancara dan observasi, maka hasil Analisa wawancara kepada bendahara desa Karangdowo yang menjadi peran utama dalam keuangan dan sistem pengelolaan dana desa merupakan hal yang penting untuk di teliti dalam hasil wawancara bendahara merasa terkendala dalam proses pengelolaan dana desa karena belum mendukungnya sumber daya alam dan manusia. Lalu setelah itu analisis wawancara sekretaris yaitu masih kurangnya kepedulian pemerintah terhadap masyarakat desa.

Dalam penelitian ini menemukan masalah utama yang perlu dianalisis dalam pengelolaan dana desa yaitu masih belum memadainya sumber daya manusia yang masih terbilang kurang. Memberikan analisis tentang gambaran pengelolaan dana desa, program aplikadi dana desa, serta laporan belanja desa sebagai hasil dari penelitian. Analisis yang dilakukan adalah hasil dari kesimpulan dari cara pandang tentang hasil pembahasan dan hasil penelitian yang didapatkan, yang berharap dapat berguna dan bermanfaat ke depannya. Setelah diuraikan system akuntansi secara umum adalah formulir, catatan, dan laporan yang di koordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan suatu organisasi. Perihal diatas sependapat dengan penelitian Martini et al. (2019), dimana hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diperlukan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan. Pengendalian dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP. SPIP berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan suatu organisasi pemerintahan dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektifitas dan perkembangan teknologi serta dilakukan secara komprehensif.

C. Kendala Yang Dialami Pemerintah Desa Dalam Proses Pengelolaan Sistem Keuangan Desa

Ada beberapa kendala yang dialami oleh pemerintahan desa dalam penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa, diantaranya yaitu:

1. Jaringan Listrik PLN dan Jaringan Internet Jaringan listrik PLN di desa Karangdowo sudah cukup memadai meskipun masih belum dikatakan baik, tetapi sudah bisa memberikan penerangan bagi masyarakat walaupun harus sering padam dan menunggu lama untuk aktif kembali. Jaringan internet menjadi kendala yang sangat berpengaruh bagi pemerintahan desa terlebih desa terpencil, seperti pada desa Karangdowo yang menjadi hambatan besar bagi para pemerintahan desa yaitu jaringan internet, karena letak desa yang terpencil menghambat koordinasi dan pengawasan terkait pengelolalan keuangan desa, termasuk karena kendala transportasi dan komunikasi yang sangat kurang memperhatikan.

2. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia aparatur desa yang kurang memadai menjadi kendala dalam implementasi aplikasi siskeudes. Sehingga menyebabkan lemahnya pengelolaan yang baik dan benar dan masyarakat masih tertinggal.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan sistem akuntansi yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan system akuntansi untuk menyediakan informasi bagi perusahaan sehingga dapat memperbaiki sistem yang sudah ada sesuai dengan sistem pengendalian intern yang baik. Akuntansi desa merupakan pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa. Dibuktikan dengan berbagai nota atau bukti lainnya yang kemudian dilakukan pencatatan serta pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan suatu informasi dalam bentuk laporan keuangan yang berguna untuk digunakan oleh beberapa pihak yang berhubungan dengan desa.

Kesimpulan wawancara adalah Teknik yang di gunakan untuk mendapatkan informasi dengan melakukan pertanyaan kepada sumber informasi, yang dapat juga dilakukan dengan terstruktur yaitu Teknik pengumpulan data, apabila telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang diteliti, dan tidak terstruktur adalah wawancara bebas di mana tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara teratur dan lengkap, melainkan menggunakan garis besar permasalahan yang ditanyakan.

Memberikan analisis tentang gambaran pengelolaan dana desa, program aplikasi dana desa, prosedur dana desa serta laporan belanja desa sebagai hasil dari penelitian.

5. DAFTAR PUSTAKA

Bangsa. 2018. "The Effect of Internal Control System, Accounting Systems on the Quality of Financial Statements Moderated by Organizational Commitments." *Accounting Analisis Journal*, 127–34.

Ismail, M., Widagdo, A.K., & Widodo, A. 2016. "Sistem Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.

Khaile. 2011. "Key Requirements for Effective Municipal Budget Oversight." *Journal of the Western Cape*.

Mulyadi. 2016. "Sistem Akuntansi Edsisi 4 Salemba Empat: Jakarta Selatan."

Nicol, Downe &. n.d. "Review If Budget Oversight by Parlianment: Ireland." *Jurnal on Budgeting*, 65–115.

Nurillah. 2014. "Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 2337–3806.

Pangalila, billy rivaldi. 2016. "Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi NO. 04" 16: 237.

Permen. 2014. "Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”

Permendagri. 2014. “Permen No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.”

“PP N0.60.” 2014. *Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.*

Priantara, ida bagus teddy. 2020. “Sistem Akuntansi Rumah Sakit.”

Santiso. 2014. “Legislatures and Budget Oversight in Latin America:Strengthening Public Finance Accountability in Emerging Economics.” *Journal on Budgeting*, 47–=46.

sari, N., Ghozali, I & achmad, T. 2017. “The Effect of Internal Audit and Internal Control System on Public Accountability: The Empirical Study in Indonesia Stae Unoversities.” *International Jpournal of Civil Engineering and Technology.*

Schalk. 2014. “Financial Oversight. A Publication of the South African Legislative Sector,” 1–94.

Sugiyono. 2019. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung.” *Alfabeta 2*: 195–205.

telaumbanua, A., & Ziliwu, N. 2022. “Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi.*